

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur dapat disimpulkan bahwa, dari keseluruhan dimensi yang memiliki karakteristik prinsip-prinsip pelayanan publik sesuai dengan model good governance yaitu *transparency*, *liability*, *controllability*, *responsibility* dan *responsiveness*, terdapat dimensi *transparency* yang menjadi sorotan permasalahan yang ada di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Cianjur. Meskipun demikian terdapat beberapa dimensi yang mendukung akuntabilitas pelayanan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

1. *Transparency*

Salah satunya adalah informasi yang berkaitan dengan prosedur pelayanan, laporan-laporan pada system pengawasan tersedia dan diberikan secara transparan. Namun sayangnya pada hasil wawancara pelaksanaan transparansi tidak dilaksanakan secara optimal, karena permasalahan yang sering terjadi di UPTD PKB ini adalah transparansi mengenai biaya pada proses pelayanan, yaitu sering terjadinya pungutan liar yang dilakukan untuk mempercepat proses pelayanan.

Kelengkapan informasi yang disampaikan dan yang ada di media ataupun pamphlet kurang jelas yang menyebabkan masyarakat kurang memahami

bagaimana tata cara pelaksanaan uji kir yang benar, dan juga masih ditemukan bahwa banyak pengguna jasa yang tidak mengetahui prosedur uji kir yang menyebabkan pengguna layanan tidak mau mengalami kesusahan saat mengganggu proses registrasi uji kir, serta kurangnya kesadaran pengguna jasa untuk lebih memperhatikan aspek keselamatan sehingga membuka celah bagi praktek jasa calo untuk mempermudah pengurusan.

2. *Liability*

Tanggung jawab sebagai individu yang menjalankan program pelayanan pengujian kendaraan bermotor, dimulai dari pejabat yang bersangkutan dan juga para staff penguji kendaraan mereka sama-sama mempunyai tanggung jawab pada tugas masing-masing yang mereka jalankan, selain itu bertanggung jawab pada konsekuensi tugas yang dijalankan apabila mereka melanggar. Dapat dikatakan bahwa tanggung jawab pegawai UPTD PKB sudah cukup baik, bahwa para pegawai semua bekerja secara maksimal mengerjakan sesuai dengan memegang dan peranan masing-masing.

3. *Controllability*

Mekanisme pengawasan program yang dilakukan sudah baik dan semuanya mengikuti aturan dan standar pelayanan, system pengawasan yang dilakukan pada setiap tahapan program juga setiap pegawai selalu melakukan pengecekan terhadap alat uji yang ada sebagai fasilitas yang dipunya dari UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat dikatakan bahwa kecakapan dan kedisiplinan sebagai penguji kendaraan sudah cukup baik.

4. *Responsibility*

Responsibility yang dimiliki oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Cianjur dalam hal pertanggung jawaban yang dilakukan terkait dengan mengikuti aturan dan standar pelayanan yang berlaku sudah cukup baik, tanggung jawab dalam system pengawasan dilaksanakan sesuai dengan berbagai bidang yang ada di UPTD Pengujian, masing-masing memiliki tanggung jawab untuk megawasi tugas yang diberikan sesuai dengan SOP UPTD dan Dinas Perhubungan.

5. *Responsiveness*

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sudah memenuhi dimensi responsiveness atau daya tanggap program pelayanan, hal ini menunjukkan bahwa dimensi prinsip-prinsip pelayanan publik dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor ini sudah berjalan dengan baik. Pemerintah UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor memberikan perhatian khusus mengenai tanggapan yang diberikan dari masyarakat yaitu dengan mewujudkan aspirasi masyarakat.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti untuk tetap mewujudkan karekteristik prinsip-prinsip pelayanan publik yang diselenggarakan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :

1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Cianjur bisa memberikan sosialiasi dan edukasi tentang pengujian kendaraan bermotor yang baik dan

benar, dan memberikan pengetahuan mengenai pentingnya memeriksakan kendaraan mereka demi pentingnya aspek keselamatan.

2. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Cianjur bisa lebih cepat tanggap terhadap pelayanan serta transparan mengenai biaya retribusi yang dilakukan saat proses registrasi, agar menghindari dari adanya tindakan untuk melakukan pungutan liar karena proses pelayanan yang lambat.
3. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah bekinerja dengan baik untuk menghargai upaya pegawai dan sebagai motivasi agar meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan pengujian kendaraan.
4. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pegawai dan fasilitas sarana dan prasarana agar meningkatkan kinerja organisasi Dinas Perhubungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Sebagai Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. hlm 13
- Bovens, M. 1998. *The Quest For Responsibility, Accountability and Citizenship in Complex Organizations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Koppel, J.G.S. 2009. *World rule, Accountability, Legitimacy, and The Design of Global Governance*. Chicago and London: The University of Chicago Press. Chapter 2
- Kumorotomo, W. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Magister Administrasi Publik (MAP) UGM. hlm 2
- Raba, M. 2006. *Akuntabilitas: Konsep dan Implementasi* Malang: UMM Press. Hlm 78
- Venita,R. 2021. *Rancangan Aktualisasi , Nilai Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara (Asn) Peningkatan Edukasi Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor UPTD Pkb Dinas Perhubungan Kabupatencianjur, Uptd Pkb, Halaman 6*
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik : Konsep, Aplikasi dan Implementasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju. hlm.190

Jurnal

- Koppel. J.G.S. 2009. *Enhancing public organizations accountability through EGovernment systems*, Internasional Journal of Conceptions on Management and Siocial Sciensces, Vol. 1, hal 17
- Pandey. S.O. 2019. *Akuntabilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Mahareket Timur*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 5, No 78.
- Wicaksono, K. 2015. *Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Vol. 19 No. 01 Hlm.7
- World Bank Site Resources. *Accountability in Governance*. Diakses dari <https://siteresources.worldbank.org/PUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/AccountabilityGovernance.pdf> pada tanggal 29 Mei 2021.

Peraturan

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
 Angkutan Jalan

Sumber Internet

- AntaraNews. 2018. *Angkutan "Online" di Cianjur Belum Uji Kir*.
<https://jabar.antarane.ws.com/berita/69922/angkutan-online-di-cianjur-belum-uji-kir>, diakses pada 25 September 2020
- Basith, A. 2016. *Tujuan Pengujian Kendaraan Bermotor Yaitu Berikan Jaminan Keselamatan Kendaraan Di Jalan*. <https://home.banjarkab.go.id/tujuan-pengujian-kendaraan-bermotor-yaitu-berikan-jaminan-keselamatan-kendaraan-di-jalan/>, diakses pada 25 September 2020
- DISHUB. 2018. *Tujuan Pengujian Kendaraan Bermotor Yaitu Berikan Jaminan Keselamatan Kendaraan di Jalan*. <https://banjarkab.go.id/tujuan-pengujian-kendaraan-bermotor-yaitu-berikan-jaminan-keselamatan-kendaraan-di-jalan/> diakses pada 25 September 2020
- DoLab. 2016. *Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif*.
<https://www.dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>,
 diakses pada 4 Juli 2021
- Kanal Informasi. 2016. *Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*,
<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>,
 diakses pada 12 juni 2021
- Ngekironline, 2016. *Daftar Uji Kendaraan Bermotor Online*.
<http://ngekironline.co.id/regulasi>, diakses pada 25 September 2020.
- Shandy, 2019. *Dishub Kabupaten Cianjur Tetap Jalankan Pelayanan KIR*.
<https://metropuncaknews.com/dishub-kabupaten-cianjur-tetap-jalankan-pelayanan-kir/>, diakses pada 25 September 2020
- Wibisana, A. 2017. *Pungli Pengujian Kendaraan, ASN Dishub Cianjur di-OTT*.
<https://kesatu.co/pungli-pengujian-kendaraan-asn-dishub-cianjur-di-ott/>,
 diakses pada 25 September 2020

Tim Media Saber Pungli. 2019. *Tiga Pejabat Dishub Cianjur Kena OTT Saber Pungli*. <https://saberpungli.id/tiga-pejabat-dishub-cianjur-kena-ott-saber-pungli/>, diakses pada 25 September 2020

World Bank Site Resources. *Accountability in Governance*. Diakses dari <https://siteresources.worldbank.org/PUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/AccountabilityGovernance.pdf> pada tanggal 29 Mei 2021.